



Rudy C Tarumingkeng: Generasi Muda dan Politik Indonesia: Dari
Apatisme ke Aktivisme Digital

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

6 April 2026

GENERASI MUDA DAN POLITIK INDONESIA: DARI APATISME KE AKTIVISME DIGITAL

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara generasi muda dan politik Indonesia kontemporer dengan menempatkan "apatisme" dan "aktivisme digital" bukan sebagai dua kutub yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua gejala yang lahir dari transformasi arena politik. Argumen utama makalah ini adalah bahwa generasi muda Indonesia tidak dapat lagi dipahami secara sederhana sebagai kelompok yang tidak peduli politik. Yang lebih tepat, sebagian anak muda menunjukkan jarak kritis terhadap institusi politik formal yang dianggap elitis, koruptif, dan tidak responsif, sementara pada saat yang sama mereka mengembangkan bentuk-bentuk partisipasi baru melalui media sosial, kampanye isu, gerakan mahasiswa, pengawasan digital, dan mobilisasi hibrida daring-luring. Dalam konteks Indonesia, perubahan ini sangat penting karena pemilih muda telah menjadi mayoritas dalam kontestasi elektoral, sementara internet dan platform digital telah menjadi infrastruktur utama komunikasi politik. Makalah ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda bergerak dari model elektoral-konvensional menuju model yang lebih cair, cepat, visual, dan jaringan. Namun, pergeseran itu juga membawa risiko: aktivisme mudah terjebak pada viralisme sesaat, manipulasi algoritmik, misinformasi, *cyber troops*, kriminalisasi ekspresi, dan kelelahan gerakan. Dengan menelaah data kepemudaan, pemilu 2024, riset akademik terbaru, serta sejumlah kasus mutakhir seperti protes Agustus 2024 dan gerakan

"Indonesia Gelap" pada Februari 2025, makalah ini menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan generasi muda mengubah energi digital menjadi partisipasi politik yang lebih berkelanjutan, kritis, dan institusional. ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung](#))

Kata kunci: *generasi muda, politik Indonesia, apatisme politik, aktivisme digital, media sosial, partisipasi politik, demokrasi*

Generasi Muda dan Politik Indonesia: Dari Apatisme ke Aktivisme Digital

Pendahuluan

Perdebatan tentang generasi muda dalam politik Indonesia hampir selalu dimulai dari satu stereotip: anak muda dianggap apatis, sinis terhadap politik, mudah dipengaruhi pencitraan, dan lebih tertarik pada hiburan digital daripada urusan publik. Stereotip ini memang tampak masuk akal bila dilihat dari rendahnya kepercayaan pada partai politik, kejenuhan terhadap elite lama, dan kecenderungan anak muda mengekspresikan kritik melalui meme, ironi, atau komentar singkat. Namun, gambaran tersebut terlalu sederhana untuk menjelaskan kenyataan Indonesia hari ini. International IDEA menilai Indonesia masih berkinerja tinggi pada dimensi partisipasi serta berada di kuartil teratas dunia dalam *civil society*, *civic engagement*, dan partisipasi elektoral, meskipun pada saat yang sama mengalami kemunduran dalam akses keadilan, pemilu yang kredibel, efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan kepastian penegakan hukum. Ini berarti partisipasi politik tidak hilang; ia justru hidup di tengah kekecewaan terhadap institusi. ([International IDEA](#))

Dalam konteks itu, generasi muda menjadi aktor yang sangat penting. Secara hukum, pemuda dalam rezim kepemudaan Indonesia tetap didefinisikan sebagai warga negara berusia 16 sampai 30 tahun. Sementara secara demografis, BPS mencatat bahwa pada 2024 jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa, sekitar seperlima penduduk nasional, dan 60,72 persen di antaranya tinggal di perkotaan. Kombinasi antara skala demografis yang besar dan konsentrasi urban yang tinggi membuat generasi muda bukan sekadar “pasar politik”, tetapi kekuatan sosial yang dapat mengubah ritme partisipasi, gaya komunikasi politik, dan agenda kebijakan. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Pemilu 2024 menegaskan posisi strategis tersebut. Data resmi KPU menunjukkan bahwa pemilih muda—Generasi Z dan milenial—mencapai 58,38 persen dari keseluruhan pemilih. Secara lebih rinci, pemilih milenial berjumlah 67.909.820 orang atau 33,44 persen, sedangkan pemilih Generasi Z berjumlah 50.645.669 orang atau 24,94 persen. KPU juga mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilu presiden 2024 mencapai 81,48 persen, dan tiga jenis pemilu pada 2024 melampaui target partisipasi nasional 79,5 persen. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa “apatisme” generasi muda tidak dapat dibaca sebagai penolakan total terhadap politik elektoral. Mereka tetap hadir dalam skala besar di arena pemilu. ([KPU](#))

Pada saat yang sama, infrastruktur digital telah mengubah cara generasi muda berpolitik. APJII melaporkan bahwa pada 2024 jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 221.563.479 orang dengan tingkat penetrasi 79,5 persen. Dari komposisi pengguna, Gen Z merupakan kelompok terbesar dengan 34,40 persen, disusul milenial 30,62 persen. Reuters juga mencatat bahwa dalam pemilu presiden 2024 semua kandidat berupaya merebut pemilih muda melalui TikTok, dan bahwa aplikasi itu memiliki 125 juta pengguna di Indonesia; selama masa kampanye, TikTok menjadi sumber informasi politik kedua yang paling banyak dipakai setelah televisi.

Dengan demikian, politik anak muda di Indonesia kini berlangsung di ruang yang semakin terdigitalisasi. ([APJII](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa pergeseran “dari apatisme ke aktivisme digital” tidak boleh dibaca sebagai cerita linear seolah-olah generasi muda dulu pasif lalu tiba-tiba aktif karena media sosial. Yang terjadi justru lebih rumit. Sebagian anak muda memang menjaga jarak dari politik formal karena menganggapnya kotor, pragmatis, dan oligarkis. Namun jarak itu tidak selalu berarti penarikan diri dari urusan publik. Dalam banyak kasus, jarak itu justru berubah menjadi bentuk partisipasi baru: pengawasan digital, kampanye isu, gerakan mahasiswa, protes hibrida, penggalangan solidaritas, dan ekspresi politik yang lebih cair. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah generasi muda apatis atau aktif, melainkan bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan mereka sedang berubah. ([Journal 2](#))

Kerangka Konseptual: Apatisme, Jarak Kritis, dan Aktivisme Digital

Dalam literatur politik, apatisme biasanya dipahami sebagai rendahnya minat, perhatian, atau partisipasi terhadap urusan politik. Akan tetapi, dalam masyarakat digital, kategori ini tidak lagi sederhana. Anak muda bisa saja tidak menyukai partai politik, enggan menjadi anggota organisasi formal, atau malas mengikuti rapat-rapat konvensional, tetapi tetap sangat intens membahas isu publik, menyebarkan kritik, ikut kampanye digital, atau turun ke jalan ketika ada isu yang dianggap melampaui batas. Karena itu, makalah ini membedakan antara apatisme sebagai ketidakpedulian total dan jarak kritis sebagai bentuk kekecewaan aktif terhadap politik institusional. Pembedaan ini penting agar kita tidak salah membaca sinisme sebagai kekosongan politik. ([Journal 2](#))

Temuan CSIS mendukung pembacaan tersebut. Dalam laporan tentang pemilih muda menuju Pemilu 2024, CSIS secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu asumsi umum dalam perdebatan politik Indonesia adalah menempatkan generasi muda sebagai kelompok yang apatis, tetapi asumsi

itu "patut diuji lebih lanjut." Laporan yang sama menemukan bahwa, pada kadar minimal, partisipasi pemilih muda tergolong tinggi, dan ada kelompok generasi muda yang memiliki ketertarikan tinggi pada politik serta memerlukan saluran partai politik untuk terlibat lebih jauh. Bahkan dalam survei itu, 85,9 persen responden muda mengaku memilih pada 2014 dan 91,3 persen pada 2019. Ini menunjukkan bahwa ketika saluran tersedia dan isu terasa relevan, anak muda tidak otomatis menjauh dari politik. ([Amazon S3](#))

Konsep kedua yang penting ialah aktivisme digital. Nugroho dalam studi kualitatif 2025 menjelaskan bahwa aktivisme digital telah menjadi arena penting keterlibatan sipil anak muda di Indonesia. Penelitiannya menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai katalis kuat bagi mobilisasi cepat, perluasan partisipasi, pembentukan identitas kolektif, dan penguatan solidaritas antarakivis muda. Pada saat yang sama, studi ini menekankan bahwa efektivitas aktivisme digital sangat bergantung pada integrasi antara kerja daring dan luring, serta dihambat oleh misinformasi, pelecehan digital, ketergantungan pada viralisme, dan kontra-mobilisasi oleh *cyber troops*. Jadi, aktivisme digital bukan sekadar "berisik di media sosial"; ia adalah bentuk politik yang baru tetapi rapuh. ([Journal of PrivietLab](#))

Dalam konteks Indonesia, konsep ini perlu dihubungkan dengan gerakan mahasiswa. Ramadhan dan Aminuddin menunjukkan bahwa aktivisme mahasiswa pasca-otoritarian di Indonesia terutama berlangsung melalui media sosial, partisipasi organisasi, diskursus publik, dan demonstrasi jalanan. Mereka juga menemukan bahwa aliansi antara kelompok kampus dan aktor masyarakat sipil eksternal menjadi semakin penting, serta bahwa gerakan mahasiswa kini banyak berfokus pada isu keadilan, kebebasan sipil, kesejahteraan, dan sentimen anti-oligarki. Artinya, aktivisme digital tidak menggantikan jalanan atau kampus; ia justru menghubungkan keduanya dalam model gerakan yang lebih hibrida. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#))

Generasi Muda Indonesia: Kekuatan Demografis dan Arena Baru Politik

Posisi strategis generasi muda dalam politik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh konteks demografis dan sosialnya. BPS mencatat bahwa pemuda Indonesia pada 2024 berjumlah 64,22 juta jiwa, dan mayoritasnya hidup di kawasan perkotaan. Karakter urban ini penting karena lingkungan kota biasanya memberi akses lebih besar terhadap pendidikan tinggi, media, jejaring organisasi, dan ruang diskusi politik. Pada saat yang sama, urbanisasi juga mempertemukan anak muda dengan persoalan yang lebih kompleks: biaya hidup, lapangan kerja, ketimpangan, polusi informasi, dan politik identitas yang intens. Karena itu, generasi muda Indonesia tumbuh dalam ruang yang sekaligus membuka peluang partisipasi dan memperbesar rasa frustrasi. ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung](#))

CSIS menyebut bahwa bila dikonversi, jumlah pemilih muda dalam konstelasi Pemilu 2024 dapat mendekati 114 juta orang. Laporan itu juga menegaskan bahwa perubahan lanskap politik Indonesia ke depan akan sangat dipengaruhi oleh tipikal pemilih muda yang dinamis, adaptif, dan responsif, terutama seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Di sini terlihat bahwa generasi muda tidak lagi dapat diperlakukan sebagai segmen tambahan dalam demokrasi; mereka justru menjadi pusat gravitasi baru yang memaksa partai, kandidat, dan negara menyesuaikan diri.

Namun besarnya jumlah tidak otomatis berarti tingginya kualitas keterlibatan. Studi tentang anak muda perkotaan dan Pemilu 2024 menunjukkan gambaran yang lebih nuansa. Penelitian itu menemukan bahwa anak muda perkotaan di Indonesia memiliki keinginan kuat untuk aktif secara politik dan mengikuti informasi secara rutin, termasuk berita politik dan debat kandidat. Tetapi mereka juga tetap pragmatis dan sadar bahwa politik tidak selalu ideal, terutama karena korupsi, administrasi yang

tidak efisien, dan dinasti politik. Mereka menyebut politik sebagai “politik yang kotor.” Jadi, keterlibatan anak muda hari ini dibangun di atas campuran optimisme dan kecurigaan. ([Journal 2](#))

Di sinilah akar kesan apatis itu berada. Yang tampak di permukaan sebagai ketidakpedulian sering kali sesungguhnya adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi. CSIS menunjukkan bahwa tren penurunan dukungan pada demokrasi dapat disematkan pada rendahnya kepercayaan terhadap lembaga politik seperti DPR. Laporan itu juga menyinggung memburuknya kepercayaan pada demokrasi karena kasus-kasus korupsi politik. Dengan demikian, apatisisme anak muda di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai krisis representasi: mereka tidak selalu menolak politik, tetapi sering menolak cara politik formal bekerja.

Mengapa Kesan Apatis Muncul?

Ada beberapa alasan mengapa generasi muda sering dilabeli apatis. Pertama, bentuk partisipasi mereka tidak selalu sesuai dengan ukuran lama. Politik generasi tua cenderung mengukur partisipasi dari keanggotaan partai, rapat organisasi, loyalitas jangka panjang, atau kehadiran dalam forum resmi. Sebaliknya, anak muda sering bergerak melalui unggahan, *thread*, video pendek, petisi, *space*, *live stream*, donasi cepat, atau kolaborasi isu yang cair. Dari sudut pandang institusi lama, bentuk-bentuk ini tampak dangkal. Tetapi dari sudut pandang politik jaringan, ia justru mencerminkan adaptasi terhadap ekosistem komunikasi baru. ([Journal of PrivetLab](#))

Kedua, anak muda sering menunjukkan sinisme terhadap elite politik. Dalam survei CSIS, perhatian pemilih muda banyak tertuju pada isu kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, demokrasi, dan kebebasan sipil. Mereka juga memperlihatkan pergeseran preferensi kepemimpinan: dari pemimpin yang sekadar “merakyat dan sederhana” menuju pemimpin yang “jujur dan anti-korupsi.” Pada 2022, 34,8 persen responden muda menyebut pemimpin jujur dan anti-korupsi

sebagai karakter yang paling dibutuhkan, jauh di atas karakter “merakyat dan sederhana” yang hanya 15,9 persen. Pergeseran ini menunjukkan bahwa anak muda sedang menilai politik dengan standar etik yang lebih keras, bukan sedang meninggalkannya. ([Amazon S3](#))

Ketiga, ruang digital sendiri memproduksi ilusi apatisme. Media sosial dipenuhi ironi, humor, *shitposting*, dan ekspresi singkat yang kadang tampak tidak serius. Padahal bentuk komunikasi ini sering berfungsi sebagai kode bersama, mekanisme framing, dan pra-mobilisasi. Dalam banyak gerakan kontemporer, meme dan slogan viral bukan lawan dari politik substantif, melainkan pintu masuk menuju partisipasi yang lebih dalam. Justru di masyarakat digital, ekspresi kasual bisa menjadi jembatan antara kejengkelan pribadi dan aksi kolektif. ([Journal of PrivietLab](#))

Keempat, generasi muda menghadapi pasar kerja dan masa depan yang makin tidak pasti. Ketika anak muda bicara tentang biaya hidup, pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan korupsi, mereka sedang mengaitkan politik dengan pengalaman eksistensialnya sendiri. Karena itu, ketika politik formal gagal menjawab keresahan tersebut, reaksi mereka bisa tampak sebagai apatisme—padahal yang terjadi adalah delegitimasi terhadap institusi yang dianggap gagal. Dalam kerangka ini, sinisme anak muda bukan gejala kemalasan sipil, melainkan gejala ketidakpuasan demokratis. ([Amazon S3](#))

Aktivisme Digital sebagai Repertoar Baru

Perkembangan internet mengubah bukan hanya medium komunikasi politik, tetapi juga logika keterlibatan. APJII menunjukkan bahwa penetrasi internet Indonesia telah mencapai 79,5 persen pada 2024 dan Gen Z merupakan kelompok pengguna terbesar. Kondisi ini menjadikan platform digital sebagai ruang publik utama bagi sebagian besar anak muda. Di sana mereka menerima informasi, membentuk opini, mengikuti *influencer* politik, mengkritik kebijakan, dan membangun solidaritas. Politik tidak lagi hanya hadir di surat kabar, rapat, atau kampanye tatap muka, tetapi di *feed*,

story, live, dan ruang percakapan digital yang berlangsung nyaris tanpa jeda. ([APJII](#))

Pemilu 2024 memberi bukti nyata. Reuters melaporkan bahwa ketiga kandidat presiden sama-sama gravitasional ke TikTok untuk merebut pemilih muda. Platform itu dipakai untuk membangun citra personal, menjawab pertanyaan secara langsung, dan menyebarkan konten yang emosional maupun ringan. Reuters juga mencatat bahwa TikTok pada masa kampanye menjadi sumber informasi politik kedua yang paling banyak digunakan setelah televisi. Hal ini menandakan pergeseran mendasar: kampanye politik kini harus berbicara dalam bahasa visual, cepat, pendek, dan mudah dibagikan. Generasi muda tidak hanya menjadi sasaran, tetapi sekaligus distributor utama pesan politik. ([Reuters](#))

Akan tetapi, perubahan ini juga membuat batas antara partisipasi dan manipulasi menjadi tipis. Reuters mencatat bahwa ruang TikTok pada Pemilu 2024 juga dipenuhi konten problematik yang berusaha memanipulasi pemilih muda, sementara *deepfake* dan informasi yang keliru beredar luas. Freedom House dalam laporan *Freedom on the Net 2025* juga menyebut bahwa kebebasan internet Indonesia sedikit memburuk; para pengkritik pemerintah, jurnalis, dan pengguna internet terus menghadapi penuntutan pidana, serangan, dan pelecehan karena aktivitas daring mereka. Skor Indonesia pada *Freedom on the Net 2025* berada di angka 48 dari 100, masih dalam kategori *Partly Free*. Artinya, aktivisme digital berkembang bukan di ruang netral, melainkan di ruang yang sekaligus rawan manipulasi dan represi. ([Reuters](#))

Karena itu, aktivisme digital harus dipahami sebagai ruang peluang sekaligus ancaman. Nugroho menyebut media sosial dapat memperluas partisipasi dan mendorong hasil nyata seperti pergeseran kebijakan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada literasi digital, tata kelola platform, dan kemampuan menghubungkan kerja daring dengan aksi luring. Aktivisme yang berhenti pada unggahan tanpa organisasi mudah

hilang bersama perubahan algoritma. Sebaliknya, aktivisme yang mampu menjadikan viralitas sebagai pintu masuk menuju koordinasi nyata memiliki daya tekan politik yang jauh lebih besar. ([Journal of PrivietLab](#))

Dari Klik ke Aksi: Politik Hibrida Generasi Muda

Perubahan terpenting dalam politik generasi muda Indonesia bukan terletak pada menggantinya politik jalanan dengan politik digital, melainkan pada lahirnya bentuk hibrida yang menggabungkan keduanya. Ramadlan dan Aminuddin menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa pasca-otoritarian di Indonesia berlangsung melalui media sosial, partisipasi organisasi, diskursus publik, dan demonstrasi jalanan. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivisme digital paling efektif justru ketika ia terkoneksi dengan organisasi kampus, jaringan masyarakat sipil, dan ruang aksi fisik. Dalam pengertian ini, media sosial adalah mesin akselerasi, bukan pengganti struktur gerakan. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#))

Kasus Agustus 2024 adalah contoh yang sangat kuat. Reuters melaporkan bahwa parlemen Indonesia akhirnya menangguk rencana perubahan aturan pemilu daerah setelah protes besar meledak di Jakarta dan kota-kota lain. Secara analitis, peristiwa ini penting karena memperlihatkan bagaimana kemarahan digital, simbol visual, jaringan kampus, dan mobilisasi jalanan saling menguatkan. Isu yang pada awalnya teknis—yakni perubahan aturan elektoral—berubah menjadi krisis legitimasi karena berhasil dibingkai sebagai ancaman terhadap fairness demokrasi. Di sini kita melihat generasi muda bukan sekadar penyaksi politik, melainkan pelaku yang mampu mengubah agenda negara. ([Reuters](#))

Protes “Indonesia Gelap” pada 20 Februari 2025 menunjukkan pola serupa. Reuters melaporkan bahwa ribuan mahasiswa turun di berbagai kota menentang pemotongan anggaran dan kebijakan lain pemerintahan Prabowo karena dianggap mengancam sistem dukungan sosial dan masa depan mereka. Yang menarik, gerakan ini menunjukkan bahwa isu ekonomi dan masa depan kesejahteraan dapat dengan cepat dijahit menjadi bahasa

politik generasi muda. Dengan kata lain, aktivisme digital anak muda tidak terbatas pada isu kebebasan sipil semata; ia juga bergerak kuat ketika menyentuh pekerjaan, pendidikan, dan keamanan hidup. ([Reuters](#))

Dalam dua contoh itu, "digital activism" tidak berarti bahwa perubahan lahir dari layar ponsel saja. Yang justru menentukan adalah kemampuan generasi muda menghubungkan jagat daring dengan aksi kolektif nyata. Inilah pergeseran besar dari era ketika anak muda dicurigai sekadar melakukan *clicktivism*. Hari ini, media sosial dapat menjadi ruang koordinasi, framing, distribusi bukti, dokumentasi kekerasan, serta penghubung antar-kota dan antar-kampus. Ia belum menggantikan organisasi, tetapi telah mengubah kecepatannya. ([Journal of PrivetLab](#))

Kampus, Aktivisme Mahasiswa, dan Politik Anak Muda

Dalam konteks Indonesia, kampus tetap menjadi salah satu simpul terpenting dalam politik generasi muda. Sejarah Reformasi 1998 membuat mahasiswa memiliki legitimasi simbolik sebagai kekuatan moral. Namun studi terbaru memperlihatkan bahwa peran itu kini mengalami transformasi. Ramadlan dan Aminuddin menunjukkan bahwa aktivisme mahasiswa pasca-otoritarian tidak lagi terutama digerakkan oleh identitas moral force yang tunggal, melainkan oleh isu-isu keadilan, kebebasan sipil, kesejahteraan, dan anti-oligarki. Perubahan ini penting karena menunjukkan bahwa kampus bukan ruang romantik yang statis, melainkan ruang yang menyesuaikan diri dengan perubahan rezim, ekonomi, dan teknologi. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#))

Kampus juga memberi kedalaman yang sering tidak dimiliki aktivisme digital murni. Di kampus, isu diperdebatkan lebih panjang; jargon dibentuk; dan jejaring solidaritas lebih terlembaga. Karena itu, banyak ledakan digital tetap membutuhkan kampus untuk memperoleh kontinuitas organisasi dan bahasa normatif. Ketika mahasiswa bergerak, protes tidak lagi tampak sekadar reaksi emosional warganet, tetapi memperoleh bobot sebagai kritik terhadap negara dari lembaga pendidikan. Hubungan inilah yang

membuat gerakan anak muda di Indonesia cenderung mengambil bentuk hibrida: viral di media sosial, tetapi berakar di organisasi kampus dan komunitas sipil. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#))

Meski begitu, kampus juga menghadapi dilema. Aktivisme mahasiswa bisa sangat kuat sebagai simbol, tetapi lemah dalam kesinambungan.

Regenerasi cepat, fragmentasi organisasi, serta tekanan akademik dan ekonomi sering membuat energi gerakan sulit bertahan. Karena itu, salah satu tantangan utama generasi muda Indonesia ialah bagaimana mentransformasikan momentum protes menjadi kapasitas kelembagaan jangka panjang: riset, advokasi kebijakan, pemantauan parlemen, kerja komunitas, dan partisipasi elektoral yang lebih strategis. Tanpa itu, aktivisme digital dan kampus mudah berhenti pada momen heroik tanpa perubahan institusional yang bertahan. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#))

Batas dan Risiko Aktivisme Digital

Meskipun tampak menjanjikan, aktivisme digital bukan obat mujarab bagi demokrasi. Risiko pertama adalah viralisme yang dangkal. Platform digital mendorong konten yang cepat, emosional, dan visual. Akibatnya, isu yang kompleks sering dipadatkan menjadi slogan singkat yang mudah memicu kemarahan tetapi tidak selalu melahirkan pemahaman mendalam. Politik anak muda dapat menjadi sangat energik dalam fase eskalasi, tetapi cepat melemah ketika memasuki fase negosiasi kebijakan yang lebih teknis. Di sinilah banyak gerakan mengalami kelelahan. ([Journal of PrivetLab](#))

Risiko kedua adalah manipulasi dan disinformasi. Reuters menulis bahwa ruang kampanye digital 2024 dipenuhi konten problematik dan *deepfake*, sedangkan Nugroho menekankan ancaman misinformasi serta kontra-mobilisasi *cyber troops*. Freedom House juga mencatat adanya *pro-government commentators*, pemblokiran situs tertentu, serta penangkapan pengguna internet. Semua ini berarti ruang digital Indonesia bukan sekadar medium ekspresi, tetapi juga arena kontestasi kuasa yang sangat

intens. Anak muda yang lahir digital belum tentu otomatis terlindungi dari manipulasi digital. ([Reuters](#))

Risiko ketiga adalah kriminalisasi dan penyempitan ruang sipil. Freedom House menilai Indonesia tetap "Partly Free" dengan skor 56/100, sedangkan *Freedom on the Net* memberi skor 48/100. Laporan *Freedom on the Net 2025* mencatat bahwa para kritikus pemerintah, jurnalis, dan pengguna internet masih menghadapi penuntutan pidana, serangan, dan pelecehan akibat aktivitas daring mereka. Ini berarti transisi dari apatisme ke aktivisme digital juga diiringi oleh meningkatnya kebutuhan akan perlindungan hukum, keamanan digital, dan solidaritas sipil. Tanpa itu, ruang digital mudah berubah dari arena partisipasi menjadi arena intimidasi. ([Freedom House](#))

Risiko keempat adalah ilusi partisipasi. Like, repost, dan komentar memang dapat membantu penyebaran isu, tetapi tidak otomatis menghasilkan daya ubah politik. Jika energi gerakan habis pada performa daring, maka negara dan elite dapat dengan mudah menunggu hingga isu digantikan isu lain. Karena itu, aktivisme digital yang matang harus mampu bergerak melampaui visibilitas menuju organisasi, pemantauan, advokasi, dan intervensi kelembagaan. Transformasi ini adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit daripada membuat tagar menjadi tren. ([Journal of PrivetLab](#))

Implikasi bagi Demokrasi Indonesia

Perubahan cara generasi muda berpolitik membawa implikasi besar bagi demokrasi Indonesia. Pertama, partai politik dan parlemen tidak bisa lagi mengandalkan pola komunikasi lama. Ketika mayoritas pemilih berasal dari generasi muda, politik representasi harus menyesuaikan diri dengan tuntutan transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Anak muda bukan sekadar ingin dipersuasi; mereka ingin dapat memeriksa, membandingkan, mengkritik, dan mendistribusikan ulang pesan politik. Kegagalan membaca perubahan ini akan memperdalam jarak antara institusi formal dan warga muda. ([KPU](#))

Kedua, demokrasi Indonesia memerlukan kanal yang lebih baik untuk mengubah keterlibatan digital menjadi partisipasi institusional. CSIS menemukan adanya kelompok anak muda yang ingin terlibat lebih jauh, bahkan ada responden yang menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD atau kepala daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa energi generasi muda sesungguhnya tidak berhenti pada kritik; sebagian ingin masuk ke arena representasi. Tantangannya adalah apakah partai politik mampu membuka ruang itu secara meritokratis, atau justru tetap mempertahankan jalur oligarkis yang membuat anak muda menjauh. ([Amazon S3](#))

Ketiga, pendidikan politik perlu diredefinisi. Pendidikan politik bagi generasi muda tidak cukup hanya mengajarkan prosedur pemilu atau struktur lembaga negara. Ia harus mencakup literasi digital, verifikasi informasi, etika komunikasi politik, keamanan siber warga, dan kemampuan membaca manipulasi algoritma. Karena politik kini banyak berlangsung di platform digital, kewargaan demokratis juga harus dilatih di sana. Tanpa literasi ini, generasi muda akan mudah dipindahkan dari partisipasi kritis ke konsumsi politik yang manipulatif. ([Reuters](#))

Keempat, negara harus mengubah sikapnya terhadap ekspresi anak muda. Bila kritik daring, protes kampus, dan mobilisasi digital terus diperlakukan sebagai ancaman keamanan atau objek kriminalisasi, maka negara justru akan mendorong generasi muda semakin tidak percaya pada jalur formal. Dalam jangka panjang, hal ini berbahaya bagi demokrasi karena mengubah energi partisipasi menjadi sinisme permanen. Negara yang sehat semestinya melihat aktivisme digital bukan hanya sebagai sumber gangguan, tetapi juga sebagai sistem peringatan dini atas krisis representasi. ([Freedom House](#))

Penutup

Makalah ini menegaskan bahwa hubungan generasi muda dan politik Indonesia hari ini lebih tepat dibaca sebagai pergeseran bentuk partisipasi

daripada pergeseran dari peduli menjadi tidak peduli. Stereotip apatisme memang memiliki dasar tertentu: rendahnya kepercayaan pada partai, sinisme terhadap korupsi, kejenuhan pada elite, dan kekecewaan terhadap institusi formal. Namun data elektoral, studi akademik, dan kasus-kasus mutakhir menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tetap sangat hadir dalam politik—hanya saja kehadiran itu kini menempuh jalur yang lebih cair, digital, visual, dan hibrida. ([KPU](#))

Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pemilih muda telah menjadi kekuatan dominan, sementara APJII menunjukkan bahwa internet telah menjadi infrastruktur sosial utama generasi muda. Riset akademik terbaru memperlihatkan bahwa aktivisme mahasiswa dan anak muda kini hidup melalui kombinasi media sosial, organisasi, diskursus publik, dan demonstrasi. Kasus protes Agustus 2024 dan gerakan “Indonesia Gelap” Februari 2025 memperkuat kesimpulan itu: generasi muda tidak sedang keluar dari politik, tetapi sedang mengubah bahasanya. ([KPU](#))

Akan tetapi, masa depan perubahan ini tetap terbuka. Aktivisme digital bisa menjadi jalan masuk menuju demokrasi yang lebih partisipatif, tetapi juga bisa terjebak pada viralisme sesaat, disinformasi, dan represi digital. Karena itu, tantangan utama generasi muda Indonesia bukan hanya menjadi gaduh di media sosial, tetapi membangun kapasitas untuk mengubah kegaduhan itu menjadi organisasi, advokasi, dan intervensi kebijakan yang bertahan. Di situlah transisi sejati “dari apatisme ke aktivisme digital” akan diuji: bukan pada seberapa sering tagar menjadi tren, melainkan pada apakah energi digital dapat diterjemahkan menjadi perubahan demokratis yang nyata. ([Journal of PrivietLab](#))

Glosarium

Aktivisme digital: bentuk keterlibatan politik dan sipil yang menggunakan media sosial, platform digital, dan jaringan daring untuk mengorganisasi opini, solidaritas, kampanye, dan aksi kolektif. ([Journal of PrivietLab](#))

Apatisme politik: kondisi rendahnya minat atau keterlibatan terhadap politik; dalam konteks anak muda Indonesia, istilah ini sering kali menutupi gejala yang lebih tepat disebut jarak kritis terhadap institusi formal. ([Amazon S3](#))

Cyber troops: aktor atau jaringan yang menggunakan ruang digital secara terorganisasi untuk memengaruhi narasi, menyerang lawan, atau melemahkan gerakan. ([Journal of PrivietLab](#))

Generasi Z: kelompok kelahiran 1997–2012; dalam data APJII 2024 merupakan kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia. ([APJII](#))

Milenial: kelompok kelahiran 1981–1996; bersama Gen Z membentuk mayoritas pemilih muda pada Pemilu 2024. ([KPU](#))

Partisipasi politik hibrida: bentuk keterlibatan yang menggabungkan kerja daring dan luring, misalnya kampanye media sosial yang berujung pada demonstrasi, penggalangan dana, atau advokasi hukum. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#))

Ruang sipil digital: arena daring tempat warga mengekspresikan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi; di Indonesia ruang ini masih menghadapi pembatasan, penuntutan, dan pelecehan. ([Freedom House](#))

Referensi (APA 7)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). *APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. ([APJII](#))

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pemuda Indonesia 2024*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2025, May 27). *Statistik Pemuda Indonesia 2024*. ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung](#))

Centre for Strategic and International Studies. (2023). *Pemilih muda dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, adaptif dan responsif*.

Centre for Strategic and International Studies. (2024). *Rilis survei pemilih muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan preferensi sosial politik pascapandemi*. ([CSIS](#))

Freedom House. (2026). *Indonesia: Country profile*. ([Freedom House](#))

Freedom House. (2025). *Indonesia: Freedom on the Net 2025 country report*. ([Freedom House](#))

International IDEA. (2026). *Indonesia country profile: The Global State of Democracy*. ([International IDEA](#))

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). *Lembar fakta KPU edisi 1*. ([KPU](#))

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023, June 23). *55% pemilih didominasi generasi muda, bantu KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024*. ([KPU](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, January 19). *Uji UU Kepemudaan ditolak, definisi pemuda tetap berusia 16–30 tahun*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Nugroho, B. H. (2025). *Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social*

movements. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(10), 91–105.

<https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603> (Journal of PrivietLab)

Ramadhan, M. F. S., & Aminuddin, M. F. (2025). Student activism in post-authoritarian Indonesia: Higher education reform, movement dynamics, and shifting political narratives. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(3), 313–327. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.51485> (SINTA)

Reuters. (2024, February 12). *Dance moves and deepfakes: Indonesia presidential candidates duke it out on TikTok*. ([Reuters](#))

Reuters. (2024, August 22). *Indonesia shelves plan to revise election law as protests rage*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, February 20). *Students lead "Dark Indonesia" protests against budget cuts*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, February 21). *Protesters extend "Dark Indonesia" rally against Prabowo's policies*. ([Reuters](#))

Sugiyono, P. B., et al. (2024). *Balancing optimism and realism: Indonesia's urban youth's political engagement in the 2024 general elections*. ([Journal 2](#))

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. (2009). ([BPK Regulations](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 6 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d37f65-3640-839d-822b-a5e109ffd3e1>